



**PROSIDING**  
**Konferensi Nasional**  
**Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**

**Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesenjangan Gender**

**Enny Agustina**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang  
ennyagustinadua@yahoo.com

**Ernawati**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang  
ernapertiba76@gmail.com

**Misnah Irvita**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang  
ita\_calpro@yahoo.co.id

**Conie Pania Putri**

Universitas Kader Bangsa  
coniepania79@gmail.com

**Abstrak**

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, membawa dampak yang sangat memprihatinkan di berbagai bidang seperti kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia. Perubahan akibat dampak pandemi tersebut yang kemudian menjadi salah satu ancaman dalam hal kesetaraan gender di Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang dampak masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kesetaraan gender serta kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur dengan menelaah buku, artikel di internet, jurnal hukum, majalah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian kepustakaan mengumpulkan data dan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama, dari aspek kesehatan, perempuan rentan terhadap COVID-19 karena mereka memegang peran utama ekonomi perawat, dari aspek sosial, akibat aturan bekerja dari rumah, perempuan lebih cenderung menghadapi beban ganda menyeimbangkan produktivitas dan pekerjaan rumah tangga mereka, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia harus aktif terlibat dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan

apabila telah berperan serta agar dapat mengawal berbagai persoalan diskriminatif gender sebagai dampak COVID-19.

**Kata kunci:** pandemi covid-19, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan.

## **Pendahuluan**

Wabah virus corona atau COVID-19 menyebabkan bencana yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di dunia semakin hari semakin bertambah. Mayoritas negara di dunia Lebih dari 100 negara di seluruh dunia memberlakukan kebijakan *lockdown* penuh atau sebagian sejak akhir Maret 2020, diantaranya China, India, Indonesia, dan Amerika Serikat (BBC, 2021).

Mathur & Awasthi (2018) dalam bukunya Diskriminasi berbasis gender yang dihadapi perempuan di tempat kerja: Kajian tentang persepsi perempuan pekerja telah mengidentifikasi berbagai faktor dasar terkait diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Faktor gender ini dipengaruhi oleh promosi dan pekerjaan. Distribusi Dukungan terhadap stereotip gender Karena pekerja yang kurang beruntung tidak dapat menyumbangkan kekuatan mereka secara efektif, kebanyakan perempuan hanya mengambil pekerjaan sipil (tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan). Selain itu, dalam dunia kerja, upah perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Kehadiran perempuan dalam kehidupan ekonomi yang aktif jarang meningkat seiring dengan peningkatan kondisi kehidupan mereka. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, wanita di beberapa negara mendapatkan 50% hingga 96% dari gaji pria. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang: bagaimana dampak masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kesetaraan gender serta bagaimana kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan?

## **Kajian Literatur**

Pandemi Covid 19 yang terjadi tentu saja membawa perubahan ke berbagai aspek dan tidak terlepas juga dari isu kesetaraan gender. Dampak wabah selalu berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Patriarki dimaknai sebagai sistem struktural sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam suatu organisasi sosial termasuk dalam keluarga. Patriarki membentuk perbedaan status gender yang tidak setara di lembaga masyarakat. Sepanjang sejarah dalam konteks feminisme, perempuan telah memperjuangkan kesetaraan, penghormatan dan persamaan hak dengan laki-laki. Bagi perempuan yang nilai patriarkalnya lebih dominan di ranah publik, tidak diragukan lagi ini menjadi tantangan tersendiri. Hal ini juga menimbulkan prasangka gender yang sering terjadi selama ini dan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya di dunia kerja. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kasus diskriminasi terhadap perempuan akibat prasangka gender masih sering menimpa perempuan. Sylvia (1983) mengatakan dalam makalahnya yang berjudul "Perempuan, Pekerjaan, Kesejahteraan, dan Pemeliharaan Patriarki" bahwa

perempuan dianggap tidak mampu untuk dipekerjakan dan dianggap tidak layak secara fisik dan moral untuk pekerjaan upahan.

Ketidaksetaraan gender diyakini telah memperburuk dampak pandemi Covid-19 pada perempuan. Rapid Gender Assessment (RGA) yang dilakukan oleh UN Women di Eropa dan Asia Tengah menemukan bahwa lebih dari 15% perempuan menganggur, 41% upah perempuan turun, dan jam kerja serta beban kerja rumah tangga perempuan selama pandemi Covid-19 telah ditambahkan. . Pandemi Covid-19 tidak hanya memengaruhi ekonomi dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pandemi bayangan adalah konsep yang menjelaskan peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19.

Keluarga sebagai "institusi gender" merupakan fokus penting penelitian feminis. Feminisme memandang keluarga dalam masyarakat patriarki sebagai manifestasi relasi gender yang tidak setara di mana peran gender perempuan disubordinasikan dan dikonstruksi. Dalam struktur sosial patriarki, perempuan terikat pada peran produksi emosional gender, yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan emosional bagi laki-laki dan laki-laki, dan memberikan kepuasan seksual bagi laki-laki. Pada saat yang sama, pekerjaan dalam keluarga, seperti pekerjaan mobil atau pekerjaan rumah, sering dianggap memiliki nilai ekonomi yang rendah dan dianggap sebagai pekerjaan tidak terampil.

Menganalisis relasi gender yang tidak setara dalam keluarga sangat penting dilakukan untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Penerapan pembatasan jarak sosial berarti sebagian besar aktivitas di tempat umum harus dilakukan di rumah. Maka dari itu, pada masa pandemi, kita telah melihat munculnya berbagai bentuk aktivitas, seperti: bekerja dari rumah, belajar jarak jauh, ibadah jarak jauh, termasuk belanja online. Konsentrasi berbagai aktivitas di dalam rumah menyebabkan meningkatnya tanggung jawab perempuan dalam keluarga. Misalnya, saat terjadi pandemi, ibu yang bekerja harus bisa mengatur beban kerja dan waktu dari rumah hingga mendampingi anaknya ke sekolah online. Saat terjadi pandemi, ketika pendapatan rumah tangga turun, ibu rumah tangga juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan kenaikan tagihan listrik.

Feminisme intersektoral merupakan salah satu konsep feminisme yang sangat penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi perempuan dan kelompok marginal selama pandemi Covid-19. Secara umum, beban keluarga yang semakin berat saat terjadi pandemi pasti akan berdampak pada perempuan. Tapi wanita bukanlah entitas yang homogen. Selama pandemi Covid-19, pekerja rumah tangga (PRT) yang biasanya dipekerjakan oleh perempuan menjadi salah satu pekerjaan yang rentan dieksploitasi. Meskipun beban kerja pembantu rumah tangga meningkat selama pandemi, pada umumnya pembantu rumah tangga tidak menerima upah tambahan. Di sisi lain, saat terjadi pandemi, PRT rentan terhadap PHK dan stigma penyebaran virus corona.

Meski perempuan berada pada posisi subordinat, namun mereka tetap memiliki institusi untuk bertahan dari pandemi bahkan bisa memberikan dukungan kepada masyarakat. Misalnya, perempuan Sumba mengembangkan rencana pendidikan untuk komunitas mereka, memberikan informasi dan bertukar informasi tentang Covid-19. Bakti sosial yang dilakukan Jogja Food Solidarity (SPJ) juga terlihat di organisasi perempuan lainnya. Selama pandemi Covid-19, SPJ berhasil mengubah prasangka buruk terhadap pekerjaan perawat (seperti

memasak di dapur) menjadi gerakan solidaritas dapur umum yang menyasar masyarakat marjinal.

Selama pandemi Covid-19, dalam ruang sosial yang terbatas, perempuan dapat mendorong aksi kolektif tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi kepentingan publik. Pengalaman organisasi perempuan seperti Rahima dan Aisyiyah menunjukkan bahwa perempuan membantu gerakan masyarakat dengan mendampingi dan mendidik gerakan solidaritas. Di saat yang sama, KAPAL Perempuan berupaya mengembangkan inisiatif solidaritas dengan tetap fokus pada kekerasan berbasis gender yang masih terjadi pada pandemi seperti pernikahan anak. Selain merespons tekanan “ruang gender” akibat wabah, perempuan juga membela politik sipil di ranah publik.

### **Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menentukan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan jika dikaitkan dengan segala keterbatasan undang-undang juga menjelaskan bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan. Memiliki semua kelebihan dan kekurangan faktor hukum dan non-hukum, dan didasarkan pada semua data yang diperoleh dalam praktek hukum empiris tentang masalah-masalah tersebut di atas (Soekanto, Soerdjono, & Mamudji, 2013).

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan jika dikaitkan dengan segala keterbatasan undang-undang maka dijelaskan pula bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan. Ia memiliki semua kelebihan dan kekurangan faktor hukum dan non hukum, dan didasarkan pada semua data yang diperoleh dalam praktek hukum empiris tentang masalah di atas.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data mentah merupakan sumber data yang tidak diperoleh melalui media perantara atau diperoleh langsung dari sumbernya. Data mentah dapat berupa opini, observasi, peristiwa atau aktivitas, dan hasil tes. Data sekunder adalah data dari studi pustaka, dimana bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan buku, literatur dan opini dari ahli hukum, jurnal hukum atau sumber lain yang terkait dengan penelitian untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah norma kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini diawali dengan regulasi yang ada yang menjadi norma hukum yang aktif di negara tersebut. Sedangkan kualitatif berarti bahwa analisis data didasarkan pada upaya menemukan asas-asas hukum dengan melihat isi peraturan perundang-undangan dan data penunjang yang diperoleh.

## Hasil dan Diskusi

### Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Pandemi COVID-19 saat ini mendominasi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dan sejarahnya terus ditulis ulang. Pada 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendapatkan informasi tentang kasus pneumonia di Kota Wuhan, China. Penyebab sindrom pernapasan akut parah yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 ini adalah virus corona baru, SARS-CoV-2. Hingga 5 Januari, tercatat 59 kasus infeksi namun tidak ada yang berakibat fatal. Sepuluh hari kemudian, WHO mencatat 282 kasus, empat di antaranya di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand (Chaplin, 2020).

Selain masalah kesehatan, pandemi ini juga berakibat buruk ke kehidupan kaum perempuan. Menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya. Namun sejak pandemi COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia (UN Women, 2021). Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas Shadow Pandemic--tren peningkatan kasus KDRT di tengah krisis COVID-19. Dalam sebuah video layanan publik Shadow Pandemic yang dinarasikan oleh aktor pemenang Academy Award, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT.

Di level domestik, yaitu Indonesia, langkah serupa dilakukan pemerintah namun secara bertahap. Dalam pidato nasional pada 15 Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah (*work from home*) jika memungkinkan, dan mengumumkan bahwa keputusan tentang *lock down* akan diserahkan ke pemerintah daerah. Di tanggal yang sama, Jakarta dan daerah lain menutup sekolah, dan beberapa provinsi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama beberapa minggu berikutnya. Pada Rabu, 9 September 2020, Anies Baswedan mengumumkan bahwa pemerintahnya memberlakukan kembali kebijakan PSBB setelah sebelumnya dilonggarkan.

Dampak kedua kebijakan WFH bagi perempuan adalah ancaman *domestic violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagi sejumlah perempuan, dipaksa diam di rumah dan tidak bisa keluar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan tubuh dan mental (Agustina, 2019). Ini dikarenakan, WFH memberikan kesempatan emas bagi seorang pelaku kekerasan sebab ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu secara privat dengan korban; jauh dari pengawasan orang lain. Pada awal kemunculan wabah COVID-19 di China, kantor polisi di negara itu menerima laporan kasus *domestic violence* hingga tiga kali lipat. Menurut laporan dari Guardian (21/03), 90% sebab kekerasan domestik tersebut memang berhubungan dengan wabah COVID-19. Bukan hanya di China, India melaporkan dua kali lipat kasus *domestic violence* di pekan pertama penerapan lockdown nasional. Di Prancis, kasus *domestic violence* meningkat tiga kali lipat. Begitu pula di Jakarta di mana dalam periode awal penerapan WFH, terdapat belasan kasus KDRT (The Jakarta Post, 2021). Saking gentingnya

fenomena ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sampai mendesak pemerintah dunia memperhatikan perlindungan kepada perempuan dalam upaya penanggulangan COVID-19.

Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan di atas dapat dinilai sebagai hasil dari sistem patriarki dan maskulinitas hegemonik di mana nilai-nilai superioritas masih lekat pada laki-laki di atas perempuan yang dianggap 'lemah' sehingga pantas disiksa. Merujuk pada penjelasan dari Komnas Perempuan tahun 2017, kekerasan terhadap perempuan terjadi memang karena adanya eksistensi kultur patriarki yang diskriminatif dan subordinatif dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara kedua gender. Isu tentang relasi kuasa inilah yang membuat feminisme salah satunya disebut sebagai gerakan politik yang mencoba mencapai keadilan politis bagi perempuan di hadapan konstruksi superioritas laki-laki (Komnas Perempuan, 2017).

Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak negatif bagi kehidupan hampir semua masyarakat dunia, tak terkecuali kaum perempuan. Untuk menangani krisis ini, berbagai negara memberlakukan sejumlah protokol kesehatan, di antaranya kebijakan *lock down* dan *Work From Home* (WFH). Meski terdapat sejumlah hasil positif dalam menekan penularan virus, kebijakan-kebijakan tersebut tidak lepas dari berbagai dampak turunan, misalnya saja dampaknya terhadap pelemahan ekonomi secara luas. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dampak sosial dan ekonomi COVID-19 terhadap perempuan secara lebih mendalam, terutama di Indonesia, China, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan India. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pandemi mempengaruhi pria dan wanita secara setara, atau keduanya diturunkan? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami tiga efek utama pandemi, yaitu beban ganda pengasuhan anak dan pekerjaan, ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perlakuan yang tidak setara di bidang ekonomi. Ketiga dampak ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 tidak *gender-neutral* dikarenakan posisi perempuan yang sejak awal tidak sebanding dengan laki-laki dalam tatanan ekonomi, sosial, dan politik internasional. Oleh karena itu, kita memerlukan gerakan emansipatoris untuk mendorong kebijakan yang sensitif terhadap isu gender dalam menghadapi pandemi COVID-19.

### **Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Yang Responsif Gender Terkait Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan**

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perempuan memainkan peran dan kontribusi yang luar biasa, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertama, menyitir Letjen TNI Doni Monardo Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa wanita berada di garis depan dalam percepatan penanganan COVID-19. Data menunjukkan bahwa di antara jumlah perawat kesehatan di Indonesia yang menangani COVID-19, perempuan sebanyak 71% dan laki-laki hanya 29%, angka ini tidak jauh berbeda dengan tenaga kesehatan global. Menurut WHO, di kalangan kesehatan global pekerja 70% adalah perempuan dan 30% adalah laki-laki. Ini jelas menunjukkan kontribusi sebenarnya dari perempuan dalam respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perempuan memainkan peran dan kontribusi yang luar biasa, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertama, ambil contoh Letnan Doni Monardo, Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Perempuan adalah pelopor dalam

percepatan penanganan COVID-19 (Monardo, 2020). Data menunjukkan bahwa di antara jumlah perawat kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, perempuan sebanyak 71% dan laki-laki hanya 29%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tenaga kesehatan global, menurut WHO 70% tenaga kesehatan global adalah perempuan dan 30% laki-laki. Ini jelas menunjukkan kontribusi sebenarnya dari perempuan dalam respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19.

Perempuan memainkan peran strategis dalam merespon masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kelompok Kerja Percepatan Penanganan COVID-19 penanganan COVID-19 melalui "Kolaborasi Pentahelix Berbasis Komunitas" melibatkan lima unsur yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media (ibid, 2021). Penulis meyakini bahwa meskipun kontribusi perempuan dapat tercermin dalam setiap aspek, namun dalam sektor kemasyarakatan, perempuan dapat memainkan peran yang strategis dan berpotensi untuk pembangunan yang sistematis. Salah satu kontribusi perempuan dalam menyikapi pandemi COVID-19 dilakukan melalui PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga), sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempertemukan perempuan. PKK ini sudah ada sejak lama dan telah meluas ke desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pentingnya PKK dihidupkan kembali dan digunakan untuk mempromosikan program pasca reformasi bagi perempuan sensitif gender (Juwita, dkk., 2017).

Selama pandemi COVID-19, beberapa pimpinan daerah mengarahkan PKK untuk membantu mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Kader PKK diharapkan dapat menyebarkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sekaligus menjaga lingkungan sekitar (khususnya keluarga) tetap sehat dan bersih. Di Jawa Barat, PKK dari 27 daerah / kota menjadi garda terdepan dalam melakukan pendataan kesehatan masyarakat, menggabungkan ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) pada abses lokal untuk melakukan konsultasi dan kegiatan sosial terkait bahaya COVID-19. Pemprov DKI Jakarta juga telah membentuk PKK untuk membantu menentukan lingkungan, mendaftarkan kelompok penularan COVID-19 yang rentan, dan mensosialisasikan cara mencegah penyebaran virus (bandungkab.go.id, 2020).

Ketiga, perempuan pada umumnya diharapkan berkontribusi pada ketahanan keluarga mereka selama pandemi COVID-19. Negara telah berupaya memutus penyebaran rantai penularan COVID-19 melalui isolasi sosial dan instruksi untuk melakukan "kerja dari rumah" (WFH). WFH ini diikuti dengan kebijakan "Homeschooling (SFH)". Di bawah kombinasi WFH dan SFH, secara umum diyakini dan diharapkan bahwa perempuan sebagai pekerja perempuan atau ibu rumah tangga dapat memainkan setidaknya tiga peran: sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, dan sebagai guru yang mendampingi anak-anaknya. Ini merupakan pengalaman sosial baru bagi perempuan pada masa WFH yang sebenarnya penuh dengan diskriminasi gender dan menambah beban psikologis dan fisik perempuan. Sayangnya, sebagai salah satu unsur penanganan "kerja sama Pentahelix berbasis komunitas" berbasis COVID-19, media justru mensosialisasikan ekspektasi sosial yang bias gender ini. Misalnya, ilustrasi sampul media Indonesia pada Senin, 16 Maret 2020, menggambarkan foto sebuah keluarga dengan seorang ayah, ibu, dan dua orang anak. Ini menggambarkan ayah bekerja di depan laptop, sedangkan ibu (mungkin seorang wanita profesional) mengajar anak-anaknya untuk belajar. Padahal, bukan hanya peran dan tanggung

jawab ibu untuk mendampingi, mendidik, dan mengasuh anak, tetapi juga peran dan tanggung jawab ayah. Kelihatannya sederhana, tetapi ekspektasi masyarakat bahwa perempuan dapat memainkan berbagai peran selama WFH dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Mengutip Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut data simponi PPPA hingga 23 April 2020, COVID-19 Saat pandemi, perempuan korban melaporkan 205 kasus KDRT (Darmawati, 2020). Isu-isu tersembunyi yang nampaknya berupa diskriminasi gender (terutama meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan selama WFH) seringkali luput dari perhatian dan ditemukan dalam berbagai narasi utama terkait sampul pandemi COVID-19.

Dalam hal mempercepat pengobatan COVID-19, banyak harapan tertuju pada perempuan. Mempertimbangkan kontribusi luar biasa yang telah diberikan wanita dalam menanggapi pandemi COVID-19, tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, kontribusi terhadap perempuan jauh dari penanganan pandemi COVID-19 yang peka gender. Padahal, dalam "Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana" telah diatur berbagai tugas di bidang penanggulangan bencana yang bertanggung jawab atas isu gender dengan memastikan bahwa hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan terwujud secara adil dan manusiawi. telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Penanggulangan Bencana. Sebagaimana telah umum diketahui, COVID-19 merupakan bencana non alam.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah ke depan untuk mendorong penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender sebagai berikut:

- (i) memastikan semua unsur dalam “Kolaborasi Pentahelix Berbasis Komunitas” dalam penanganan percepatan COVID-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender agar tidak memproduksi praktik dan narasi diskriminatif gender, khususnya kepada kaum perempuan;
- (ii) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia masuk dalam satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 (jika bergabung) sehingga dapat memantau berbagai isu diskriminasi gender COVID-19;
- (iii) Mempertimbangkan untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari aktivis perempuan, organisasi perempuan dan kelompok perempuan untuk bekerja dengan satgas percepatan penanganan COVID-19 sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan membantu mengatasi berbagai gender dalam penanganan dan proses penanganan masalah terhadap COVID-19.

Terkait harapan bahwa perempuan akan memainkan peran utama dalam mempercepat respons terhadap pandemi COVID-19, mereka harus menghadapi pandemi COVID-19 serta melindungi hak dan kebutuhannya baik wanita dan pria harus adil dan manusiawi.

## **Kesimpulan**

Pandemi COVID-19 saat ini berdampak negatif pada kehidupan hampir semua orang di dunia, termasuk wanita. Menanggapi krisis ini, banyak negara telah menerapkan banyak kebijakan kesehatan, termasuk kebijakan lock-in dan bekerja dari rumah (WFH). Meski banyak hasil positif yang telah dicapai dalam menahan penyebaran virus, kebijakan tersebut tidak dapat dibedakan dari berbagai efek turunannya (seperti dampak resesi ekonomi global).

Untuk mendorong respon terhadap pandemi COVID-19 yang sensitif gender, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: memastikan bahwa seluruh elemen dalam “Kerja Sama Pentahelix Berbasis Komunitas” sedang dalam proses penanganan COVID-19, yaitu Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, Media sadar gender untuk menghindari praktik dan narasi diskriminatif gender, terutama bagi perempuan; memastikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia masuk dalam satuan tugas Mempercepat COVID-19 (jika bergabung) agar dapat memantau akibat COVID-19; dapat dianggap bekerjasama dengan Satgas yang mendorong penanganan COVID-19 untuk membentuk kelompok kerja aktivis perempuan, organisasi perempuan, dan kelompok perempuan sehingga dapat mengidentifikasi dan membantu mengatasi dan membantu mengatasi berbagai persoalan gender pada saat penanganan maupun dampak penanganan COVID-19.

## **Referensi**

- Bressler, C. E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007
- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM. 2002
- Monardo, Doni. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam Webinar Diskusi Hari Kartini 23 April, “Peran, Kesiapan, dan Ketahanan Perempuan dalam Perang Melawan Covid-19” yang diselenggarakan oleh KPP-RI (Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia), KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia), dan MPI (Maju Perempuan Indonesia. 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Soetjipto, Ani W., & Adelina, Shelly. *Suara Dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*. Jakarta: Marjin Kiri. 2013.
- Agustina, Enny. 2019. *Criminal Law Policy in Health Care*. International Journal Of Research In Law, Economic And Social Sciences, Vol 1 No 2
- Backer, M. 1999. *Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive* (pp. 21-25). University of Chicago Legal Forum, 21-25
- Chaplin, S. 2020. *COVID-19: a brief history and treatments in development*. Prescriber Volume 31 Issue 5, 23-28.

- Dewi, Kurniawati Hastuti. (2017). Protecting Environment and Securing Power: Female Leaders' Political Initiative in the Age of Climate Change in Indonesia and Japan. International Journal of Indonesian Studies vol. 1, no. 4: 122-160
- Harel-Shalev, 2020. A. *Feminist International Relations (IR) Theory*. The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies (pp. 2-4).
- Juwita, Dewa Ayu Putu Ratna., dkk. 2017. *Pemberdayaan Kader dan Dasawisma Dalam Pencegahan Kasus Demam Berdarah Dengue di Banjar Menak, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*. *Warmadewa Medical Journal* vol. 2, no. 2: 60-70
- Mathur & Awasthi. 2018. *Gender-Based Discrimination Faced By Females At Workplace: A Perceptual Study* (pp. 2-6). *Journal of Entrepreneurship Education* .
- Sylvia. 1983. *Women, Work, Welfare, And The Preservation Of Patriarchy* (pp. 1250-1254). University of Pennsylvania, Law Review. American Law Register. VOL. 131, 1250-1254.
- BBC. Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts. Retrieved from [bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-52103747](https://www.bbc.com/news/world-52103747) [Accessed Maret, 5 2021]
- beritajakarta. id. (2020). "Gubernur Anies Imbau RT/RW dan PKK Aktif Mendata Serta Sosialisasi Warga dengan Risiko Tinggi Tertular COVID-19", 30 Maret. Diakses pada 13 Maret 2021 dari <http://www.beritajakarta.id/read/78309/gubernur-anies-imbau-rtrw-dan-pkk-aktif-mendata-serta-sosialisasi-warga-dengan-risiko-tinggi-tertular-covid-19>
- bandungkab.go.id (2020). "PKK Barisan Terdepan Mendata Kesehatan Masyarakat", Senin, 13 April. Diakses pada 1 Maret 2021 dari <http://www.bandungkab.go.id/arsip/pkk-barisan-terdepan-mendata-kesehatan-masyarakat>
- balipost.com. (2020). "PKK Agar Ikut Berperan Cegah Dampak Corona", 11 Maret. Diakses pada 13 Maret 2021 dari <http://www.balipost.com/news/2020/03/11/108878/PKK-agar-Ikut-Berperan-Cegah...html>
- Gaduh, A., Hanna, R., Kreindler, G., & Olken, B. LOCKDOWN AND MOBILITY IN INDONESIA. Retrieved 2020 from Center for History and Economics Harvard University: <https://histecon.fas.harvard.edu/climate-loss/indonesia/index.html>.
- gosulut.id (2020). "Gelar Rakor TP-PKK Kabupaten Gorontalo, Bahas Penanganan Covid-19", 9 April. Diakses pada 13 Maret 2021 dari <https://gosulut.id/post/gelar-rakor-tp-pkk-kabupaten-gorontalo-bahas-penanganan-covid-19>
- Nurbaiti, A. Jakarta reimposes PSBB, orders people to stay home. Retrieved 9 September 2020 from Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/09/jakarta-reimposes-psbb-orders-people-to-stay-home.html>
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017. Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

The Jakarta Post. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/07/jakarta-records-spike-in-domestic-violence-reports-during-work-from-home-period.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

UN Women. The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>.

